

Dilema Program Adiwiyata: Antara Idealitas dan Realitas Implementasi di Kepulauan Riau

Muhammad Yunus¹, Mulia Wiwin²

¹Universitas Maritim Raja Ali Haji, ²IAIMu Kota Tanjungpinang

*Corresponding Author e-mail: muhammadyunus@umrah.ac.id

Abstract: *This article examines the implementation dilemma of the Adiwiyata Program in Riau Islands Province, focusing on the gap between policy ideals and actual practice. Employing a qualitative approach with the CIPP evaluation model (Context, Input, Process, Product), the study evaluates policy, planning, implementation, and outcomes of the program. Data were collected through in-depth interviews, observations, and document analysis. The findings reveal that while the policy framework complies with standards, the planning, implementation, and outcomes are yet to be optimized. Major issues include inconsistency in execution, weak stakeholder coordination, and ineffective assessment of Adiwiyata schools. This study contributes theoretically to the evaluation of environmental education policy and offers strategic recommendations for strengthening program governance at the provincial level. The novelty of this research lies in its focus on provincial-level evaluation, contrasting with previous studies centered on schools. The findings are expected to inform the development of more effective and sustainable environmental education policies*

Key Words: Adiwiyata Program, CIPP evaluation, policy implementation, environmental education, Riau Islands

Abstrak: Artikel ini mengkaji dilema implementasi Program Adiwiyata di Provinsi Kepulauan Riau, dengan fokus pada kesenjangan antara cita-cita kebijakan dan praktik nyata. Dengan menggunakan pendekatan kualitatif dengan model evaluasi CIPP (Context, Input, Process, Product), penelitian ini mengevaluasi kebijakan, perencanaan, implementasi, dan hasil program. Data dikumpulkan melalui wawancara mendalam, observasi, dan analisis dokumen. Temuan penelitian mengungkapkan bahwa meskipun kerangka kebijakan telah sesuai dengan standar, perencanaan, implementasi, dan hasil belum optimal. Masalah utama meliputi inkonsistensi dalam pelaksanaan, koordinasi pemangku kepentingan yang lemah, dan penilaian sekolah Adiwiyata yang tidak efektif. Penelitian ini memberikan kontribusi secara teoritis terhadap evaluasi kebijakan pendidikan lingkungan hidup dan menawarkan rekomendasi strategis untuk memperkuat tata kelola program di tingkat provinsi. Kebaruan penelitian ini terletak pada fokusnya pada evaluasi tingkat provinsi, berbeda dengan penelitian sebelumnya yang berpusat pada sekolah. Temuan penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi bagi pengembangan kebijakan pendidikan lingkungan hidup yang lebih efektif dan berkelanjutan

Kata Kunci: Program Adiwiyata, evaluasi CIPP, implementasi kebijakan, pendidikan lingkungan hidup, Kepulauan Riau

Pendahuluan

Isu lingkungan hidup telah menjadi sorotan utama dalam agenda pembangunan berkelanjutan di berbagai negara. Krisis iklim, degradasi ekosistem, deforestasi, dan meningkatnya emisi gas rumah kaca menjadi tantangan global yang mengancam keberlanjutan hidup manusia. Laporan *World Development Report* (World Bank, 2022) menegaskan bahwa keberlanjutan lingkungan merupakan salah satu pilar penting dalam mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkeadilan. Oleh karena itu, dibutuhkan pendekatan transformatif dalam pendidikan yang mampu membangun kesadaran kritis terhadap pentingnya pelestarian lingkungan sejak usia dini.

Di Indonesia, upaya pengarusutamaan pendidikan lingkungan hidup (PLH) dalam sistem pendidikan nasional terus diintensifkan melalui berbagai kebijakan, salah satunya adalah melalui Program Adiwiyata. Program ini merupakan inisiatif Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) yang bertujuan untuk mendorong sekolah agar menjadi institusi yang peduli dan berbudaya lingkungan, serta mencetak generasi yang bertanggung jawab terhadap kelestarian alam (Permen LH No.



5 Tahun 2013). Dalam implementasinya, Adiwiyata mencakup penguatan kebijakan sekolah, pengintegrasian dalam kurikulum, pelibatan partisipatif warga sekolah, serta pengelolaan sarana prasarana berbasis lingkungan. Banyak sekolah mengalami kesulitan dalam mengalokasikan anggaran khusus untuk kegiatan lingkungan, dengan dana yang tersedia seringkali hanya mencakup sebagian kecil dari rencana anggaran tahunan sekolah (RKAS).

Bila dilihat dari berbagai studi menunjukkan adanya kesenjangan antara idealitas kebijakan Program Adiwiyata dengan kenyataan implementatif di lapangan. Iswari dan Utomo (2017) mengungkapkan bahwa meskipun kesadaran dan sikap ramah lingkungan mulai terbentuk, namun proses internalisasi nilai-nilai Adiwiyata dalam pembelajaran masih kurang maksimal. Pradini et al. (2018) mencatat pentingnya peran kepemimpinan dan manajemen sekolah dalam keberlanjutan program. Sementara itu, Tompodung et al. (2018) menegaskan bahwa partisipasi seluruh elemen sekolah menjadi kunci dalam membangun budaya lingkungan yang berkelanjutan. Penelitian-penelitian tersebut umumnya difokuskan pada evaluasi implementasi Adiwiyata di tingkat sekolah secara mikro.

Hingga saat ini, kajian mengenai implementasi Adiwiyata dalam perspektif kebijakan dan kelembagaan di tingkat provinsi masih sangat terbatas. Padahal, keberhasilan program di tingkat satuan pendidikan sangat dipengaruhi oleh sistem dukungan dan tata kelola yang dibentuk oleh pemerintah daerah. Kesenjangan ini menjadi penting untuk diisi, khususnya di daerah-daerah dengan kompleksitas geografis seperti Provinsi Kepulauan Riau, yang terdiri dari wilayah-wilayah kepulauan dengan aksesibilitas dan karakteristik pembangunan yang berbeda dari daerah kontinental.

Penelitian ini mengadopsi pendekatan evaluatif dengan model CIPP (*Context, Input, Process, Product*) yang dikembangkan oleh Stufflebeam, guna memberikan evaluasi komprehensif terhadap pelaksanaan Program Adiwiyata di Provinsi Kepulauan Riau. Model ini dinilai relevan untuk menilai keberhasilan kebijakan dari perumusan hingga hasil implementasinya secara holistik. Melalui pendekatan ini, penelitian bertujuan untuk: (1) mengevaluasi kesesuaian konteks kebijakan Adiwiyata di daerah dengan standar nasional; (2) mengkaji perencanaan dan input sumber daya yang disediakan oleh pemerintah daerah; (3) menilai proses implementasi di sekolah; dan (4) mengukur produk dan dampak program terhadap capaian lingkungan hidup di dunia pendidikan. Beberapa sekolah menghadapi lemahnya dukungan dari instansi pemerintah dan masyarakat sekitar, yang mempengaruhi keberlanjutan dan efektivitas program.

Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya menawarkan kontribusi praktis bagi penguatan implementasi Adiwiyata di Kepulauan Riau, tetapi juga kontribusi teoritis dalam bidang manajemen kebijakan pendidikan lingkungan, khususnya di wilayah kepulauan yang selama ini belum banyak disentuh oleh studi-studi sebelumnya. Diharapkan hasil penelitian ini dapat menjadi rujukan dalam perumusan kebijakan pendidikan lingkungan hidup yang lebih kontekstual, partisipatif, dan berkelanjutan.

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian evaluatif. Model evaluasi yang digunakan adalah **CIPP** (*Context, Input, Process, Product*) yang dikembangkan oleh Stufflebeam. Model ini dipilih karena memungkinkan peneliti mengevaluasi program secara menyeluruh, mulai dari dasar kebijakan hingga hasil akhir yang dicapai. Fokus penelitian diarahkan pada empat aspek

utama: kebijakan program (*context*), perencanaan program (*input*), pelaksanaan program (*process*), dan hasil program (*product*).

Lokasi dan Subjek Penelitian

Penelitian dilaksanakan di Provinsi Kepulauan Riau yang terdiri dari tujuh kabupaten/kota. Pemilihan lokasi ini didasarkan pada status Provinsi Kepri sebagai daerah kepulauan yang telah menerapkan Program Adiwiyata sejak tahun 2012. Subjek penelitian terdiri dari pejabat Dinas Lingkungan Hidup Provinsi, Tim Pembina dan Penilai Adiwiyata, Kepala Sekolah, dan Guru dari sekolah yang menerima predikat Sekolah Adiwiyata.

Teknik Pengumpulan Data

Data dikumpulkan melalui tiga teknik utama:

1. Wawancara mendalam dilakukan kepada informan kunci yang memiliki peran strategis dalam implementasi program, seperti pejabat dinas dan kepala sekolah. Pertanyaan wawancara disusun berdasarkan indikator evaluasi CIPP.
2. Observasi langsung dilakukan di beberapa sekolah Adiwiyata untuk melihat kesesuaian praktik dengan standar program.
3. Studi dokumentasi meliputi analisis dokumen kebijakan, laporan kegiatan, data capaian sekolah Adiwiyata, serta hasil penilaian Adiwiyata dari tahun 2012 hingga 2016.

Instrumen Penelitian

Instrumen penelitian berbentuk panduan wawancara, lembar observasi, dan daftar *checklist* dokumen. Seluruh instrumen dikembangkan berdasarkan komponen dan indikator evaluasi program CIPP, serta divalidasi melalui *expert judgment* dari dua akademisi dan satu praktisi lingkungan hidup.

Teknik Analisis Data

Data dianalisis secara interaktif menggunakan model dari Miles, Huberman, dan Saldaña, yang terdiri atas tiga langkah utama:

1. Kondensasi data dilakukan melalui kategorisasi tematik berdasarkan indikator evaluasi CIPP.
2. Penyajian data disusun dalam bentuk naratif dan matriks untuk memudahkan interpretasi.
3. Penarikan kesimpulan dan verifikasi dilakukan secara terus-menerus selama proses pengumpulan dan pengolahan data untuk menjaga kredibilitas dan konsistensi temuan.

Uji Keabsahan Data

Keabsahan data dijaga melalui empat strategi, yaitu:

1. Kredibilitas, dilakukan dengan triangulasi sumber dan teknik.
2. Transferabilitas, dijaga dengan deskripsi kontekstual lokasi penelitian yang rinci.
3. Dependabilitas, dilakukan melalui audit trail dari seluruh proses analisis data.
4. Konfirmabilitas, dijaga dengan menyimpan dokumentasi data asli dan hasil analisis secara transparan.

Metode ini dirancang untuk memastikan bahwa evaluasi pelaksanaan Program Adiwiyata di Provinsi Kepulauan Riau dilakukan secara sistematis, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan, serta relevan untuk direplikasi oleh peneliti lain pada konteks kebijakan serupa.

Hasil dan Pembahasan

Hasil

Penelitian ini mengkaji pelaksanaan Program Adiwiyata di Provinsi Kepulauan Riau berdasarkan model evaluasi CIPP, meliputi konteks kebijakan, input program, proses pelaksanaan, dan produk atau hasil yang dicapai. Hasil yang diperoleh mencerminkan keberhasilan sebagian dan hambatan besar dalam implementasi program, terutama pada aspek perencanaan dan konsistensi pelaksanaan antar wilayah.

1. Evaluasi Konteks: Kesesuaian Kebijakan dan Dukungan Regulasi

Hasil evaluasi konteks menunjukkan bahwa secara normatif kebijakan Program Adiwiyata di Provinsi Kepulauan Riau telah memiliki landasan regulatif yang kuat. Program ini dijalankan atas dasar Peraturan Menteri Lingkungan Hidup No. 5 Tahun 2013 yang memberikan panduan tentang standar pelaksanaan dan tujuan strategis pembentukan sekolah berbudaya lingkungan. Pemerintah daerah telah memasukkan Program Adiwiyata dalam dokumen perencanaan lingkungan hidup daerah dan mengintegrasikannya ke dalam kegiatan Dinas Lingkungan Hidup Provinsi. Hal ini menunjukkan adanya komitmen pada tataran dokumen.

Namun, pada tingkat implementasi, ditemukan disparitas komitmen antara kabupaten/kota. Beberapa daerah seperti Bintan dan Tanjungpinang menunjukkan kemajuan signifikan dalam merespons kebijakan Adiwiyata dengan membentuk unit pembina khusus dan menjalankan program pembinaan secara periodik. Sebaliknya, lima kabupaten/kota lainnya seperti Karimun, Natuna, Lingga, dan Kepulauan Anambas belum memiliki struktur kelembagaan atau inisiatif khusus yang mengarah pada penguatan Program Adiwiyata. Ketimpangan ini mengindikasikan bahwa keberadaan kebijakan tidak serta-merta diikuti dengan komitmen kelembagaan yang merata di semua wilayah. Meskipun sebagian besar siswa menunjukkan sikap peduli terhadap lingkungan, tingkat pengetahuan dan tindakan nyata mereka seringkali masih terbatas.

Lebih lanjut, hasil wawancara dengan pejabat Dinas Lingkungan Hidup menyebutkan bahwa beberapa daerah merasa program ini sebagai “program pusat” dan bukan bagian dari prioritas daerah. Hal ini berdampak pada rendahnya penganggaran dan minimnya pembinaan di wilayah-wilayah tersebut. Dengan demikian, konteks kebijakan dapat dinilai kuat pada tataran peraturan, tetapi lemah dalam internalisasi kelembagaan dan pelaksanaannya secara merata.

2. Evaluasi Input: Kapasitas Perencanaan dan Dukungan Sumber Daya

Hasil temuan pada aspek input mengungkapkan bahwa dukungan sumber daya dan perencanaan program di tingkat provinsi dan kabupaten/kota belum sepenuhnya mendukung keberhasilan implementasi Program Adiwiyata. Hal ini dapat dilihat dari rendahnya angka sekolah yang berhasil memperoleh predikat Adiwiyata dibandingkan jumlah sekolah yang ada di masing-masing wilayah. Dari total 1.562 sekolah di seluruh Kepulauan Riau, hanya 19 sekolah (1,22%) yang menjadi sekolah Adiwiyata. Capaian ini jauh di bawah ekspektasi nasional, dan bahkan lebih rendah dibandingkan rata-rata capaian di provinsi lain seperti Jawa Barat dan Yogyakarta yang mencapai 8-10%.

Secara rinci, Kabupaten Bintan menjadi wilayah dengan pencapaian tertinggi, yakni 10 sekolah Adiwiyata dari 158 sekolah (6,33%). Tanjungpinang menyusul dengan 6 sekolah (4,80%), sementara Batam dengan total sekolah terbanyak (609 sekolah) hanya mencatat 3 sekolah Adiwiyata (0,49%). Ironisnya, empat kabupaten lainnya, yaitu Karimun, Natuna, Lingga, dan Kepulauan Anambas tidak memiliki satu pun sekolah Adiwiyata. Hal ini menunjukkan ketimpangan perencanaan dan alokasi sumber daya antar wilayah yang signifikan.

Minimnya pembinaan teknis, tidak adanya insentif kelembagaan bagi sekolah, serta lemahnya sinergi antara Dinas Lingkungan Hidup dan Dinas Pendidikan menjadi penyebab utama lemahnya input program. Dalam beberapa kasus, kepala sekolah mengaku tidak mengetahui adanya program Adiwiyata di tingkat provinsi atau belum pernah menerima pembinaan teknis. Ini menunjukkan bahwa faktor *input* baik dalam bentuk kebijakan operasional, sumber daya manusia, maupun anggaran masih menjadi kendala besar dalam pelaksanaan program. Beberapa sekolah kekurangan fasilitas yang memadai, seperti lahan untuk kegiatan penghijauan dan sarana daur ulang, yang menghambat pelaksanaan program secara optimal.

Tabel 1. Distribusi Sekolah Adiwiyata di Kepulauan Riau Tahun 2015
(BLH Prov. Kepri, 2015)

NO.	Kabupaten/Kota	Jumlah Sekolah	Sekolah Adiwiyata	Persentase (%)
1	Tanjungpinang	125	6	4,80
2	Batam	609	3	0,49
3	Bintan	158	10	6,33
4	Karimun	233	0	0,00
5	Natuna	137	0	0,00
6	Lingga	195	0	0,00
7	Kep. Anambas	105	0	0,00
	Kepulauan Riau	1.562	19	1,22

3. Evaluasi Proses: Praktik Implementasi di Sekolah

Proses implementasi Program Adiwiyata di sekolah-sekolah di Kepulauan Riau cenderung masih bersifat administratif dan simbolik. Hasil observasi di lapangan serta wawancara dengan kepala sekolah dan guru menunjukkan bahwa kegiatan lingkungan yang dilakukan masih terbatas pada momentum-momentum tertentu seperti peringatan Hari Lingkungan Hidup atau kegiatan bersih-bersih sekolah. Program belum menyentuh aspek pedagogis seperti pengintegrasian nilai-nilai lingkungan dalam pembelajaran atau penguatan budaya sekolah yang berkelanjutan.

Sebagian besar guru belum mendapatkan pelatihan tentang bagaimana menyisipkan isu lingkungan ke dalam Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) atau bagaimana memfasilitasi partisipasi aktif siswa dalam kegiatan berbasis proyek lingkungan. Kegiatan partisipatif yang dilakukan cenderung bersifat top-down, didorong oleh inisiatif kepala sekolah atau komite, dan belum menjadi bagian dari kebiasaan harian warga sekolah. Hal ini menegaskan bahwa program belum mengalami internalisasi nilai secara menyeluruh di tingkat sekolah.

Selain itu, mekanisme penilaian sekolah Adiwiyata juga belum berjalan secara konsisten. Beberapa informan menyatakan bahwa proses seleksi dan pemberian predikat Adiwiyata sering kali tidak disertai dengan umpan balik yang konstruktif atau tindak lanjut pembinaan. Bahkan, ada sekolah yang mempertanyakan indikator penilaian karena kurangnya sosialisasi. Dengan demikian, aspek proses memperlihatkan bahwa meskipun semangat pelaksanaan ada, mekanisme pelaksanaannya belum dibarengi dengan sistem pendampingan yang komprehensif.

4. Evaluasi Produk: Hasil dan Dampak Program

Hasil evaluasi produk menunjukkan bahwa capaian nyata dari Program Adiwiyata di Provinsi Kepulauan Riau masih sangat terbatas. Dari 1.562 sekolah yang tersebar di tujuh kabupaten/kota, hanya 19 sekolah yang berhasil memperoleh predikat Adiwiyata. Angka ini mencerminkan tingkat keberhasilan sebesar 1,22%, yang jauh dari harapan

nasional. Fakta bahwa lebih dari 98% sekolah belum terlibat atau belum berhasil dalam program ini menandakan adanya hambatan serius dalam pencapaian tujuan utama program, yaitu menjadikan sekolah sebagai basis pembentukan budaya peduli lingkungan secara menyeluruh dan berkelanjutan. Integrasi isu lingkungan dalam kurikulum dan Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) seringkali belum maksimal, sehingga pembelajaran berbasis lingkungan belum sepenuhnya tercapai.

Tidak hanya dari sisi kuantitatif, dari aspek kualitatif pun produk program belum sepenuhnya menunjukkan perubahan yang substantif. Sebagian besar kepala sekolah yang diwawancarai menyatakan bahwa meskipun sekolah telah menjalankan beberapa kegiatan berbasis lingkungan, kegiatan tersebut belum terintegrasi dengan visi sekolah dan belum terukur secara sistematis. Tidak ditemukan instrumen evaluasi internal yang digunakan secara berkala untuk menilai perubahan perilaku warga sekolah terkait isu lingkungan. Hal ini mengindikasikan bahwa penghargaan Adiwiyata lebih sering dijadikan sebagai simbol *prestise* administratif daripada indikator keberhasilan transformasi budaya sekolah.

Selain itu, belum terdapat mekanisme pelaporan atau pelacakan dampak jangka panjang dari program. Tidak ada data yang menunjukkan perubahan konkret dalam hal efisiensi energi, pengurangan limbah, atau peningkatan partisipasi komunitas sekolah terhadap isu lingkungan setelah sekolah menerima predikat Adiwiyata. Temuan ini sejalan dengan kritik Dunn (2018), yang menyatakan bahwa banyak evaluasi kebijakan publik terjebak pada pengukuran output administratif dan mengabaikan outcome substansial. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa dari sisi produk, implementasi Program Adiwiyata di Kepulauan Riau belum mencerminkan keberhasilan transformasional, baik dalam konteks perilaku, sistem, maupun hasil jangka panjang yang berkelanjutan.

Pembahasan

1. Konteks: Paradoks Regulasi dan Komitmen Daerah

Program Adiwiyata secara nasional didesain sebagai upaya strategis untuk menginternalisasi nilai-nilai lingkungan dalam dunia pendidikan. Landasan regulasinya kuat, ditandai dengan diterbitkannya Permen Lingkungan Hidup No. 5 Tahun 2013 yang menjadi acuan teknis dan administratif pelaksanaan. Namun, di tingkat lokal, kekuatan kebijakan ini tidak secara otomatis menjamin kesuksesan implementasi. Di Provinsi Kepulauan Riau, misalnya, hanya sebagian kecil kabupaten/kota yang mengembangkan turunan kebijakan dalam bentuk Peraturan Daerah (Perda), Rencana Aksi Daerah (RAD), atau petunjuk teknis lokal.

Kondisi ini menegaskan adanya jarak antara regulasi nasional dengan komitmen daerah. Pemerintah daerah, dalam hal ini dinas pendidikan dan dinas lingkungan hidup, tidak secara aktif memformulasikan strategi lokal yang adaptif terhadap karakteristik wilayah. Hal ini berdampak langsung terhadap kesenjangan pelaksanaan antarwilayah. Bintan dan Tanjungpinang yang memiliki dokumen perencanaan program lebih jelas, cenderung lebih siap dalam pembinaan dan seleksi sekolah Adiwiyata. Sebaliknya, daerah seperti Natuna dan Kepulauan Anambas, meskipun secara geografis luas dan memiliki potensi alam tinggi, belum mengembangkan regulasi atau strategi lokal dalam mendukung program ini.

Fenomena ini mencerminkan apa yang dikemukakan oleh Fullan (2007) bahwa keberhasilan implementasi kebijakan pendidikan tidak hanya ditentukan oleh isi kebijakan (*policy content*), tetapi juga oleh konteks implementasi dan kapasitas

eksekutif di lapangan. Ketika konteks daerah tidak mendukung, maka kebijakan yang baik pun dapat gagal. Dengan demikian, kesenjangan konteks dalam pelaksanaan Program Adiwiyata di Kepulauan Riau menjadi indikator penting perlunya penguatan kelembagaan dan pengarusutamaan pendidikan lingkungan dalam sistem perencanaan daerah.

2. Input: Lemahnya Perencanaan dan Ketiadaan Roadmap

Salah satu temuan utama dalam penelitian ini adalah tidak adanya perencanaan terstruktur dalam implementasi Program Adiwiyata di tingkat provinsi. Tidak ditemukan dokumen *roadmap*, peta jalan atau rencana pengembangan berjenjang yang menunjukkan bagaimana capaian program ditargetkan dari tahun ke tahun. Padahal, keberhasilan program sangat bergantung pada kejelasan arah kebijakan dan pembinaan sistematis. Sekolah-sekolah yang berhasil mendapatkan predikat Adiwiyata umumnya adalah hasil inisiatif pribadi kepala sekolah atau guru yang memiliki pengalaman pribadi dalam isu lingkungan hidup.

Kelemahan dalam input ini diperparah oleh minimnya sinergi antarinstansi terkait. Koordinasi antara Dinas Lingkungan Hidup dan Dinas Pendidikan belum berjalan secara fungsional. Dalam banyak kasus, sekolah merasa tidak tahu kepada siapa mereka harus berkoordinasi dalam proses pembinaan dan penilaian. Tidak adanya forum lintas sektor di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota menjadi bukti lemahnya tata kelola program secara kelembagaan. Ini bertentangan dengan semangat kolaboratif yang seharusnya menjadi fondasi dalam pendidikan lingkungan hidup sebagaimana ditekankan oleh Sterling (2010).

Selain itu, tidak ditemukan mekanisme distribusi sumber daya yang proporsional antar wilayah. Sebagian besar anggaran lingkungan hidup di tingkat provinsi lebih diarahkan ke kegiatan fisik dan seremonial. Sementara penguatan kapasitas SDM di sekolah seperti pelatihan guru, pengembangan media pembelajaran, atau penyusunan kurikulum tematik lingkungan masih sangat terbatas. Kondisi ini mengindikasikan bahwa input program belum dirancang untuk menghasilkan transformasi mendalam dalam ekosistem pendidikan.

3. Proses: Program Belum Menjadi Bagian dari Budaya Sekolah

Pelaksanaan Program Adiwiyata di lapangan menunjukkan bahwa sebagian besar sekolah belum menjadikan program ini sebagai bagian integral dari budaya sekolah. Meskipun beberapa sekolah melakukan kegiatan penghijauan, pemilahan sampah, atau kerja bakti, namun kegiatan ini lebih bersifat responsif terhadap agenda lomba atau penilaian dari dinas. Belum ditemukan pola implementasi yang menunjukkan internalisasi nilai secara sistemik, mulai dari pembelajaran di kelas, struktur organisasi sekolah, hingga pengambilan keputusan sekolah yang melibatkan isu-isu lingkungan.

Proses integrasi nilai lingkungan ke dalam kurikulum juga belum berjalan optimal. Banyak guru menyampaikan bahwa tidak ada pelatihan atau panduan teknis dalam mengembangkan Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) berbasis lingkungan. Beberapa guru yang berhasil mengintegrasikan tema lingkungan ke dalam pembelajaran melakukannya berdasarkan inisiatif pribadi atau hasil pelatihan di luar program resmi pemerintah daerah. Padahal, sebagai program nasional, Adiwiyata seharusnya disertai dengan mekanisme dukungan profesional yang kuat dan terukur.

Selain itu, partisipasi warga sekolah masih bersifat sporadis. Dalam beberapa kasus, siswa dan orang tua bahkan tidak tahu bahwa sekolah mereka mengikuti Program Adiwiyata. Tidak ada forum diskusi siswa, musyawarah wali murid, atau mekanisme pelibatan komunitas lokal dalam mendukung pengembangan sekolah berwawasan

lingkungan. Hal ini memperlihatkan bahwa program belum benar-benar hidup sebagai proses pembudayaan, tetapi masih menjadi aktivitas administratif dan dekoratif.

4. Produk: Evaluasi yang Berfokus pada Output, Bukan Outcome

Secara hasil, capaian Program Adiwiyata di Provinsi Kepulauan Riau sangat rendah dibandingkan dengan jumlah sekolah yang ada. Dari 1.562 sekolah, hanya 19 yang mendapatkan penghargaan Adiwiyata, atau sekitar 1,22%. Ini jauh dari target nasional maupun provinsi lain seperti Jawa Tengah dan Jawa Timur yang telah mencapai lebih dari 10% keterlibatan sekolah. Temuan ini menunjukkan bahwa pelaksanaan program belum memberikan dampak luas terhadap perubahan sistem pendidikan.

Lebih dari itu, evaluasi program masih didominasi oleh instrumen administratif, seperti kelengkapan dokumen, foto kegiatan, dan absensi. Tidak ada instrumen yang menilai perubahan perilaku siswa, keberlanjutan kegiatan lingkungan, atau partisipasi komunitas. Evaluasi berbasis hasil (*outcome*) belum menjadi bagian dari sistem pemantauan program. Ini menunjukkan bahwa capaian produk masih bersifat *output-oriented*, bukan berbasis transformasi atau keberlanjutan.

Menurut Stufflebeam (2014), keberhasilan evaluasi kebijakan tidak hanya diukur dari jumlah penghargaan yang diberikan, tetapi dari sejauh mana program menghasilkan dampak nyata dan berkelanjutan. Oleh karena itu, Program Adiwiyata perlu beralih dari paradigma penghargaan ke paradigma transformasi pendidikan. Indikator keberhasilan harus mencakup pembentukan budaya sekolah ramah lingkungan, perubahan kebijakan internal sekolah, dan keterlibatan berkelanjutan dari komunitas sekitar.

Hasil pembahasan ini menunjukkan bahwa Dilema Program Adiwiyata di Kepulauan Riau adalah dilema antara idealitas kebijakan yang telah dirancang baik dengan realitas implementasi yang belum sepenuhnya didukung oleh sistem dan kapasitas daerah. Keberhasilan di beberapa daerah membuktikan bahwa dengan dukungan perencanaan dan pembinaan yang tepat, Program Adiwiyata dapat berjalan baik. Namun tanpa strategi terstruktur dan pendekatan lintas sektor, program ini berisiko menjadi kegiatan simbolik tanpa makna jangka panjang.

Kesimpulan

Penelitian ini menemukan bahwa implementasi Program Adiwiyata di Provinsi Kepulauan Riau masih menghadapi tantangan serius di berbagai aspek. Secara kebijakan, memang terdapat regulasi yang memayungi pelaksanaan program secara nasional. Namun, komitmen dan kesiapan daerah dalam menerjemahkan kebijakan tersebut ke dalam strategi lokal masih sangat terbatas. Hanya beberapa wilayah seperti Tanjungpinang dan Bintan yang menunjukkan keberpihakan terhadap kebijakan pendidikan lingkungan hidup. Ketidakhadiran peraturan daerah, peta jalan, dan forum koordinasi antarinstansi di sebagian besar kabupaten/kota menjadi hambatan sistemik dalam pelaksanaan program.

Pada aspek perencanaan dan dukungan sumber daya (*input*), belum ditemukan kerangka kerja strategis yang memastikan program berjalan terstruktur, bertahap, dan berkelanjutan. Ketiadaan roadmap, lemahnya koordinasi lintas sektor, serta rendahnya alokasi anggaran untuk pembinaan menyebabkan program ini berkembang secara tidak merata. Input program belum dirancang untuk menghasilkan transformasi kelembagaan di sekolah. Di samping itu, kapasitas sumber daya manusia di tingkat pelaksana dan pembina program juga belum dikuatkan secara sistematis.

Dalam hal proses dan hasil, mayoritas sekolah menjalankan Program Adiwiyata secara seremonial dan administratif, belum mencapai internalisasi nilai lingkungan ke dalam budaya sekolah. Praktik pembelajaran masih jarang menyentuh aspek pedagogi lingkungan hidup secara mendalam. Partisipasi warga sekolah pun belum optimal, dan tidak terdapat sistem monitoring terhadap perubahan perilaku maupun dampak sosial. Capaian secara kuantitatif sangat rendah (1,22%), dan secara kualitatif, belum mampu membangun kultur sekolah ramah lingkungan yang kokoh. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa terdapat ketimpangan yang signifikan antara idealitas kebijakan Adiwiyata dan realitas pelaksanaannya di wilayah kepulauan.

Rekomendasi

Pertama, diperlukan reformulasi kebijakan di tingkat provinsi dan kabupaten/kota untuk memperkuat kelembagaan Program Adiwiyata. Pemerintah daerah perlu menetapkan kebijakan pendukung melalui Peraturan Daerah atau Surat Keputusan Kepala Daerah yang secara eksplisit menempatkan Program Adiwiyata sebagai bagian dari strategi pembangunan pendidikan dan lingkungan hidup. Selain itu, perlu dibentuk tim koordinasi lintas sektor (DLH, Dinas Pendidikan, Bappeda, dan stakeholder eksternal) guna menjamin sinergi antarlembaga dalam pembinaan dan evaluasi program.

Kedua, dalam aspek perencanaan dan pelaksanaan, disarankan agar provinsi menyusun *roadmap* pengembangan Program Adiwiyata lima tahunan, lengkap dengan target kuantitatif dan kualitatif. Setiap sekolah seharusnya memiliki jalur pembinaan mulai dari calon Adiwiyata hingga mandiri, dengan dukungan pelatihan, modul pembelajaran, serta supervisi teknis dari tim pembina. Pemerintah daerah juga harus mengalokasikan anggaran khusus untuk program ini, tidak hanya untuk kegiatan fisik, tetapi juga untuk peningkatan kapasitas SDM dan penguatan kelembagaan sekolah.

Ketiga, untuk menjamin keberlanjutan, evaluasi Adiwiyata harus dikembangkan dari sekadar penilaian administratif menjadi penilaian berbasis transformasi. Indikator penilaian sebaiknya mencakup perubahan perilaku warga sekolah, inovasi lingkungan yang diinisiasi sekolah, dan dampak sosial-ekologis ke komunitas. Pemerintah pusat dan daerah juga perlu membangun sistem pemantauan berbasis digital dan berbagi praktik baik antarwilayah. Selain itu, perlu dibangun *community of practice* antar sekolah Adiwiyata di Kepulauan Riau sebagai forum pembelajaran kolektif dan penguatan budaya lingkungan secara horizontal.

Daftar Pustaka

- Badan Lingkungan Hidup Provinsi Kepulauan Riau. (2015). *Profil Lingkungan Hidup Tahun 2015*. Tanjungpinang: Badan Lingkungan Hidup Provinsi Kepulauan Riau.
- Dunn, W. N. (2018). *Public policy analysis: An integrated approach* (6th ed.). Routledge.
- Fullan, M. (2007). *The new meaning of educational change* (4th ed.). Teachers College Press.
- Iswari, R. D., & Utomo, S. W. (2017). Evaluasi penerapan program Adiwiyata untuk membentuk perilaku peduli lingkungan di kalangan siswa: Kasus SMA Negeri 9 Tangerang Selatan dan MAN 1 Serpong. *Jurnal Ilmu Lingkungan*, 15(1), 35–41. <https://doi.org/10.14710/jil.15.1.35-41>
- Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia. (2020). *Laporan tahunan program Adiwiyata nasional*. KLHK.
- Permen LH No. 5 Tahun 2013 tentang Pedoman Pelaksanaan Program Adiwiyata.

- Pradini, I. K., Sujanto, B., & Nurjannah. (2018). Implementasi program sekolah Adiwiyata dalam peningkatan mutu pendidikan di SDN Tanah Tinggi 3 Kota Tangerang. *Jurnal Green Growth dan Manajemen Lingkungan*, 7(2), 122–132. <https://doi.org/10.21009/jgg.072.03>
- Stake, R. E. (2002). *Evaluation methods in education*. Sage Publications.
- Sterling, S. (2010). Transformative learning and sustainability: Sketching the conceptual ground. *Learning and Teaching in Higher Education*, 5, 17–33.
- Stufflebeam, D. L., & Coryn, C. L. S. (2014). *Evaluation theory, models, and applications* (2nd ed.). Jossey-Bass.
- Susilowati, I. W., Wilujeng, I., & Hastuti, P. W. (2018). Growing environmental literacy towards Adiwiyata schools through natural science learning based on pedagogy for sustainability. *Journal of Science Education Research*, 2(2), 97–100. <https://doi.org/10.21831/jsr.v2i2.22480>
- Tompodung, T. C. G., Rushayati, S. B., & Aidi, M. N. (2018). Effectiveness of Adiwiyata programme towards sustainable living behaviour at Depok City. *Jurnal Pengelolaan Sumberdaya Alam dan Lingkungan*, 8(2), 170–177. <https://doi.org/10.29244/jpsl.8.2.170-177>
- World Bank. (2022). *World Development Report 2022: Environmental sustainability and development*. World Bank Group.